

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan

Pengertian pemberdayaan sudah banyak dikemukakan oleh para pakar. Bila dilihat dari akar katanya “daya” merupakan kata dasar dan ditambah awalan “ber” yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan tenaga/kekuatan, maka art dari kata berdaya adalah mempunyai tenaga/kekuatan. Berdasarkan penjelasan tadi, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan. Menurut Priyono dan Pranark secara umum pemberdayaan merupakan proses menuju berdaya. Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah masyarakat yang belum berdaya menjadi berdaya.¹

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menyatukan nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru yang berpusat pada masyarakat, inklusif, berdaya dan berkelanjutan. Konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi lebih kepada mencari alternatif untuk pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu alternatif strategi pembangunan telah dikembangkan dalam berbagai literatur dan pemikiran, meskipun dalam praktiknya belum maksimal dilaksanakan. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang banyak dibicarakan di masyarakat karena berkaitan dengan pembangunan dan perubahan bangsa ini di masa depan, apalagi jika dikaitkan dengan keterampilan yang masih

¹ Priyono S. Onny dan Pranarka A.M.W. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi* (Jakarta: CSSI), 11

kurang dimiliki masyarakat, sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.²

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi pada intinya kata kunci dari pemberdayaan meliputi: proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Dengan kata lain keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga aktifnya pihak yang diberdaya untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya.³

Mardikanto dan Soebiato berpendapat bahwa pemberdayaan sebagai suatu proses adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan (kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk masyarakat yang mengalami kemiskinan. Pemberdayaan sebagai suatu proses berarti kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan dan memperoleh sumber daya dan pelayanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup (baik secara individu, kelompok maupun dalam masyarakat dalam arti yang lebih luas). Melalui pemahaman ini, peningkatan dapat diartikan sebagai proses terencana yang dirancang untuk meningkatkan utilitas dari tujuan yang ditingkatkan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai kegiatan sosial dimana warga masyarakat mengorganisasikan diri sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk membuat rencana dan kegiatan bersama, memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial.

Pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditujukan kepada individu tetapi juga pada kelompok yang merupakan bagian dari pemenuhan eksistensi manusia. Oleh karena itu, orang/masyarakat dapat dijadikan sebagai acuan normatif, yang menempatkan konsep pemberdayaan

² Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jural Ilmiah CIVIS, Vol. 1, No. 2, 2011. 88

³ Dedeh Maryani, Ruth Roseline E Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Sleman: CV Budi Utama), 2019, 8

masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan eksistensi masyarakat bagi individu, keluarga, bahkan bangsa. kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat memerlukan pengenalan kredit manusia untuk membantu lebih memahami implementasi berbagai konsep atau program pemberdayaan di masyarakat.⁴

Subejo dan Supriyanto memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang sengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui kegiatan kolektif dan berjenjang sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Pemberdayaan masyarakat bukanlah sebuah proses jangka pendek, namun merupakan proses jangka panjang.⁵

Pemberdayaan dimaksud suatu proses menyeluruh ialah proses aktif antara motivator, fasilitator serta kelompok masyarakat yang diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keahlian serta pemberian bermacam kemudahan dan kesempatan untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa pendapat lain tentang pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Robinson (1994) merupakan sesuatu proses individu serta sosial, sesuatu pembebasan keahlian individu, kompetensi, kreativitas, serta kebebasan berperan.⁶
- 2) Pemberdayaan menurut Payne (1997), pemberdayaan bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh daya, kekuatan serta keahlian untuk mengambil keputusan serta aksi yang hendak dicoba serta berhubungan dengan diri masyarakat tersebut, termasuk mengurangi hambatan individu serta sosial dalam melaksanakan aksi.

Pemberdayaan menurut Jim Ife, pemberdayaan ialah memajukan sumber daya, peluang, pengetahuan, ataupun keahlian kepada individu ataupun kelompok guna

⁴ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, De La Macca, Makassar, 1 juni 2018. 11

⁵ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat* (Sleman: VC BUDI UTAMA), 2017, 23

⁶ Ajeng Dini Utami, *Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Temanggung, Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 10

meningkatkan keahlian mereka dalam memastikan masa depannya serta bisa berperan serta dalam kehidupan masyarakatnya.⁷

b. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata “power” yang berarti kekuasaan atau pemberdayaan. Oleh karena itu, gagasan utama pemberdayaan terkait dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan sering dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.⁸ Pemberdayaan sebagai proses perubahan memiliki istilah yang bermakna. Dengan kata lain, potensi proses pemberdayaan tergantung pada dua hal:

- 1) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- 2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian yang tidak statis, melainkan dinamis.

Secara harfiah, pemberdayaan bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan” kepada masyarakat yang lemah. Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Namun, hal yang penting dalam proses pemberdayaan yaitu peningkatan kesadaran. Masyarakat yang sadar adalah masyarakat yang memahami hal-hal dan tanggung jawab secara politik, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan sekelompok masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat agar memiliki keberdayaan dalam menghadapi segala persoalan yang ada.

Banyak ahli memperdebatkan konsep pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah Payne, dan pemberdayaan pada dasarnya adalah apa yang klien lakukan tentang diri mereka sendiri, termasuk mengurangi dampaknya pada hambatan pribadi dan sosial dalam membuat keputusan dan

⁷ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 24-25

⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm.57

mengambil tindakan. Ini dilakukan melalui fase kepercayaan untuk menggunakan kekuatan yang dia miliki, termasuk mentransfer kekuatan dari orang-orang di sekitarnya.⁹ Seperti dikutip Alfitri, menurut Craig dan Mayo, konsep pemberdayaan masyarakat terdiri dari unsur kemandirian, partisipasi, jejaring dan keadilan. Pembangunan holistik tersebut dimulai dari aspek manusia, sosial dan ekonomi.¹⁰

Seperti yang dikutip oleh Oos dalam bukunya, Slamet menekankan bahwa esensi dari pemberdayaan adalah memberdayakan masyarakat untuk membangun diri dan meningkatkan taraf hidupnya. Istilah kompeten di sini antara lain berdaya, memahami, termotivasi, memiliki peluang, menemukan dan memanfaatkan peluang, energik, bekerja sama Artinya mampu melakukan sesuatu, mengetahui alternatif, mampu mengambil keputusan, mengambil risiko, dan mampu mencari dan mengumpulkan informasi. Bertindak atas inisiatif Anda. Sementara itu, menurut Suharto, setidaknya ada empat elemen metrik pemberdayaan. Ini adalah tindakan yang dilakukan melalui tindakan yang disengaja dan kolektif, meningkatkan kehidupan masyarakat, memprioritaskan kelompok rentan dan kurang beruntung, dan program peningkatan kapasitas.

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan berarti dorongan atau motivasi, bimbingan atau dukungan untuk meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat agar menjadi mandiri. Komitmen ini merupakan fase proses pemberdayaan untuk mengubah perilaku, mengganti kebiasaan lama dengan perilaku baru yang baik, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada partisipasi semua aktor, baik di pemerintahan maupun di semua lapisan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu, melibatkan semua aktor, baik masyarakat maupun pemerintah, melalui proses pengembangan dan pemanfaatan

⁹ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 78

¹⁰ Alfitri, *Community Development: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 22

sumber daya yang potensial untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.¹¹

Konsep pemberdayaan masyarakat sejak bergulir di tahun 1970 terus mengalami berbagai penyesuaian sehingga mempengaruhi juga teori-teori yang berkembang kemudian. Jika dilihat dari proses operasionalnya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain:

- 1) Kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses, yang memberikan atau pengalihan sebagian kekuatan, kemampuan kepada masyarakat atau individu agar lebih berdaya.
- 2) Kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan keberdayaan untuk menentukan apa yang atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.¹²

Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan penguatan-penguatan modal sosial. Apabila kita sudah mempercayakan (trusts), patuh aturan (role), dan jaringan (networking) memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur (direct) masyarakat serta menstransfer pengetahuan kepada masyarakat.¹³

Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkupi asa sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan. Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk

¹¹ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Goblal* (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm, 52-52

¹² Muhammad Muqouwis, *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Konsep dan Aplikasi: Dari PKMD Hingga Desa Siaga* (Bandar Lampung: Yayasan Bina Masyarakat Mandiri) 2017, 11

¹³ Eko Sudarmanto, Erika Revida, dkk, *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat Pembangunan dan Pemberdayaan* (Medan: Yayasan Kita Menulis) 2020, 76

mendapatkan gaji / upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya.¹⁴ Berbagai tulisan Sumodiningrat dalam Mardi, konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun saja, atau cabang saja, atau batang saja, atau akar saja, karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing aspek.
- 2) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumber daya manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya.
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien.
- 4) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika upaya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan secara optimal pasti memerlukan proses yang cukup lama dan di dukung pula oleh sejumlah faktor lain didalamnya mencakup dana yang cukup, tenaga fasilitator/pendamping/agen pembaharu yang profesional dan terampil dalam bidangnya.¹⁵

c. Prinsip Dasar Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya ialah memberikan persiapan serta perlindungan untuk masyarakat agar pembangunan mutu kehidupan yang lebih berdaya

¹⁴ Andi Nu Graha, *Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi*, Jurnal Ekonomi MODERNISASI, Vol. 5, No. 2, 2009, 121-122

¹⁵ Andi Haris, *Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media*, Dosen pada Jurusan Sosiologi Universitas Hasanuddin Makassar, Vol. 8, No. 2, 2014, 52

sehingga kesejahteraan bisa terjadi. Untuk melakukan program pemberdayaan, agen pemberdayaan harus berpedoman pada prinsip-prinsip pemberdayaan dengan melihat pada hakikat dan konsep pemberdayaan sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan menggunakan metode yang demokratis serta menjauhi faktor pemaksaan.
- 2) Aktivitas pemberdayaan dilandaskan pada kebutuhan, masalah, serta kemampuan klien/sasaran.
- 3) Sasaran pemberdayaan ialah subjek ataupun masyarakat dalam aktivitas pemberdayaan.¹⁶
- 4) Pemberdayaan ialah meningkatkan nilai, tradisi, serta keistimewaan yang mempunyai nilai tinggi dimasyarakat.
- 5) Pemberdayaan ialah suatu kegiatan yang membutuhkan waktu, maka dicoba dengan cara tersusun serta terus menerus.
- 6) Kegiatan pendampingan harus memenuhi secara berpengalaman, tersusun dan terus menerus.
- 7) Pemberdayaan bukan memenuhi salah satu sudut pandang, namun butuh dilakukan secara keseluruhan terhadap semua seluruh sudut pandang aktivitas yang ada pada masyarakat.
- 8) Pemberdayaan harus dicoba untuk kalangan wanita paling utama anak muda serta ibu muda selaku keahlian besar ketika mengungkit keunggulan aktivitas keluarga dan pengentasan kesusahan.
- 9) Pemberdayaan masyarakat mempunyai cita-cita akan menggali secara berkesinambungan serta berkesinambungan.
- 10) Pemberdayaan harus mencermati keberagaman budaya.
- 11) Pemberdayaan dituju untuk menggerakkan peran serta aktif individu serta masyarakat sebanyak-banyaknya.
- 12) Keuntungan menyampaikan jiwa kewirausahaan pada klien/target menjadi persiapan mengarah kemandirian.
- 13) Agen pemberdayaan butuh mempunyai keahlian (kompetensi) yang lumayan dinamis, fleksibel dalam berperan, dan bisa mengajak pertumbuhan era serta tuntutan (permintaan) masyarakat.

¹⁶ Ajeng Dini Utami, *Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Temanggung, Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 37

- 14) Pemberdayaan Cuma bisa dilakukan bila seluruh pihak yang terdapat serta terpaut dengan masyarakat ingin keikutsertaan, mulai dari faktor pemerintah, LSM, tokoh masyarakat, sukarelawan, serta anggota masyarakat itu sendiri.¹⁷

d. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama dari pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kekuatan masyarakat, terutama kelompok lemah yang tidak berdaya karena kondisi internal atau eksternal (adanya ketidakadilan dalam struktur sosial). Pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat, terutama kelompok rentan dan lemah, untuk mengembangkan kekuatan dan kapasitas yang terkait, antara lain:¹⁸

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan. Tidak hanya bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan.
- 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang mungkin mereka dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- 3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memampukan dan memberdayakan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan / keterbelakangan / ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat pada indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak mencukupi/memadai. Kebutuhan dasar tersebut meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan transportasi. Meskipun keterbelakangan seperti produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, akses yang terbatas terhadap lahan melemahkan pasar lokal/tradisional karena digunakan untuk kebutuhan perdagangan internasional, meskipun ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat.

¹⁷ Ajeng Dini Utami, *Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Temanggung, Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 39

¹⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm.58

Dengan kata lain, masalah keterbelakangan mencakup struktural (politik) dan kultural.

Menurut mardikanto dan poerwoko, tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi berbagai upaya perbaikan:

- 1) Perbaikan pendidikan (*better education*) artinya, Pemberdayaan harus direncanakan sebagai bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan melalui pemberdayaan tidak terbatas pada perbaikan materi, metode, waktu dan tempat, serta hubungan antara pelatih dan penerima manfaat, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pendidikan nonformal dapat ditingkatkan. dalam proses penguatan. Mendorong semangat dan keinginan untuk terus belajar tanpa mengenal batas waktu dan usia.
- 2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*) artinya, Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar sepanjang hayat, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas terutama ketersediaan sumber pengetahuan/inovasi, sumber pembiayaan/pendanaan, pemasok produk, peralatan dan lembaga pemasaran.
- 3) *Better Performance* mengacu pada penyediaan pendidikan yang lebih baik dan akses ke sumber daya yang lebih baik (manusia, alam dan sumber daya lainnya/buatan manusia) yang diharapkan mengarah pada kinerja yang lebih baik.
- 4) Perbaikan kelembagaan (*better Institution*) Artinya perbaikan dalam operasi/tindakan diharapkan dapat meningkatkan kelembagaan masyarakat khususnya pengembangan jaringan kemitraan perusahaan sehingga tercipta posisi tawar yang kuat di masyarakat.
- 5) Meningkatkan bisnis (*better business*), meningkatkan pendidikan (*spirit of learning*), meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan operasional dan meningkatkan kelembagaan, diharapkan dapat meningkatkan bisnis/usaha yang dikelola.
- 6) Peningkatan Pendapatan (*Better Income*) artinya dengan meningkatkan usaha saat ini dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- 7) Memperbaiki lingkungan (*better environment*) artinya perbaikan pendapatan dapat memperbaiki lingkungan

(fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

- 8) Perumahan yang lebih baik berarti bahwa tingkat pendapatan yang memadai dan lingkungan yang sehat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup setiap keluarga dan masyarakat.
- 9) Didukung oleh sumber daya masyarakat yang lebih baik (better community), situasi kehidupan yang lebih baik dan lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik.¹⁹

Dalam rangka mengemban tugas dalam pemberdayaan masyarakat, Badan Pemberdayaan menetapkan visi, misi, kebijakan, strategi dan program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Visi pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemandirian masyarakat.
- 2) Misi Pemberdayaan Masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian dan secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Kemandirian dalam konsep pemberdayaan yang dimaksud adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan, artinya untuk membangun bangsa yang mandiri dibutuhkan perekonomian yang mapan.²⁰

e. Model-model Pemberdayaan Masyarakat

Model-model pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Ada tiga model program pemberdayaan masyarakat di Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain:²¹

¹⁹ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (De La Macca, Makassar). 12-13.

²⁰ Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah CIVIS, vol. 1, No. 2, 2011, hal 90-91

²¹ Adib Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam," *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016): 198-199

1) Model Pembangunan Nasional yang Berorientasi pada Pertumbuhan

Menurut *Mazzarol* dan *Reboud*, yang berpendapat bahwa ukuran dari pertumbuhan dan kinerja yang lebih kuat, yang juga mencakup tenaga kerja, omset penjualan, profitabilitas, dan permodalan, dan tujuan yang diinginkan. Namun, temuan ini berimplikasi pada pendidikan pemangku kepentingan, menyarankan agar mereka fokus pada pengembangan sistem manajemen untuk membandingkan pengembangan modal dengan praktik terbaik. Pemangku kepentingan juga harus waspada dalam lingkungan yang berubah, berkomitmen pada inovasi dan siap untuk berubah atau mengambil tindakan jika diperlukan. Namun, mereka juga harus menyadari pentingnya memiliki visi strategis yang jelas untuk organisasi mereka dan kebutuhan untuk mengomunikasikan visi pengembangan model berorientasi pertumbuhan yang dirancang khusus untuk angkatan kerja. Kemudian perubahan paradigma pembangunan nasional dari sentralisasi ke desentralisasi menyebabkan perubahan pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran.²²

Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional (perspektif ekonomi) dalam jangka waktu misal per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi, antara lain melalui:

- a) akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan SDM;
- b) peningkatan tenaga kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas;
- c) kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional.

Model ini hanya fokus pada pertumbuhan angka pendapatan nasional saja, sebagai peningkatan hasil GNP per-tahun sampai angka 7 persen atau lebih. Sehingga

²² Mahadiansar, dll. “*Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional di Indonesia*”. Universitas Brawijaya. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol 17. No. 1 juni 2020. 83-84

proses pembangunan terpusat pada produksi, sementara penghapusan kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan menduduki urutan penanganan kedua, lebih-lebih hanya dicapai dengan teori “*trickle-down effect*”.

2) Model Pembangunan yang Berorientasi pada Kebutuhan Dasar

Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdall yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat miskin, misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain. Untuk itu, maka pemerintah dapat melakukan subsidi atau bantuan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat. Model pembangunan kebutuhan dasar dari ILO (International Labour Office), yang sangat terkenal pada paruh kedua dasawarsa 1970-an dan awal tahun 1980-an menyusul diselenggarakan World Employment Conference pada tahun 1976.

Menurut *Lund et al* ada 5 prinsip utama model pembangunan kebutuhan dasar yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya meskipun esensi model ini tidak memiliki indikator yang saling melengkapi dalam model pembangunan kebutuhan dasar. Diantaranya yaitu:

- a) Pembangunan kapasitas : merupakan bagian dari kebutuhan dasar pembangunan, dimana kapasitas merupakan ruang untuk mengomentari model pembangunan yang akan dilaksanakan. Contoh kapasitas pelayanan terpadu, pelayanan terpadu ini merupakan upaya dimana masyarakat memiliki kesempatan untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara sebagai masyarakat yang mengikuti peraturan dan ketentuan yang ada. Bahwa efisiensi sebagai bentuk pembangunan merupakan landasan baik penyelenggaraan negara maupun penyelenggaraan negara untuk kebutuhan dasar yang harus dikembangkan untuk dilaksanakan. Namun peningkatan kapasitas membutuhkan peran

masyarakat dalam hal ini partisipasi agar pengembangan kapasitas yang dilakukan sesuai dengan keinginan seluruh pemangku kepentingan yang ada.²³

- b) Mata pencaharian berkelanjutan: merupakan bagian dari pengembangan kebutuhan pokok dengan mata pencaharian masyarakat sesuai dengan kondisi dan letak geografis masing-masing daerah, yang dapat dikembangkan menjadi mata pencaharian multifungsi dengan manfaat lingkungan yang lestari.
- c) Penelitian dalam pembangunan: model pembangunan kebutuhan dasar memerlukan sebuah kajian baik dari akademisi maupun praktisi. Hal ini bertujuan agar model pembangunan kebutuhan dasar memiliki landasan dan acuan yang kuat seperti naskah akademik dalam melaksanakan pembangunan kebutuhan dasar yang mencakup berbagai sektor. Penelitian dalam pembangunan merupakan proses yang tak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan, implementasi pembangunan maupun evaluasi pembangunan dalam memperkuat model pembangunan berkebutuhan dasar.
- d) Manajemen dan admistrasi: model pembangunan kebutuhan dasar yang memainkan fungsi dan perannya seperti perencanaan pembangunan, pengarahan dan pengendalian pembangunan serta mengimplementasikan sebuah manajemen dan administrasi secara efisien dan efektif sebagai bentuk pembangunan yang diperlukan kebutuhan dasar. Seperti contoh menjalankan sebuah proyek pembangunan di daerah maupun nasional dengan memperhatikan model pembangunan kebutuhan dasar dari segi manajemen dan administrasi agar proyek yang dikerjakan bisa dikategorikan efisien dan efektif secara fisik dan pelaksanaannya.
- e) Kesehatan mental masyarakat : model pembangunan dasar memiliki peran yaitu perlunya kesehatan mental masyarakat ini bertujuan kesiapan masyarakat akan

²³ Mahadiansar, dll. "*Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional di Indonesia*". Universitas Brawijaya. Jurnal Ilmu Adminitrasi. Vol 17. No. 1 juni 2020. 86

menerima pembangunan yang berkebutuhan dasar, artinya kebutuhan dasar dalam pembangunan ini harus tepat sasaran, hal ini bisa memicu konflik jika tidak adanya persiapan yang baik dalam pembangunan masyarakat. Kesehatan mental yang dimaksud lebih mengarah pada persiapan pemikiran masyarakat yang akan berdampak pada kesehatan individu maupun kelompok akibat pengaruh pembangunan di wilayahnya. Kemudian perlu dengan mempertimbangkan resiko dari sisi positif maupun sisi negatif dalam pelaksanaan pembangunan berkebutuhan dasar.²⁴

Proses pembangunan kebutuhan dasar yang memiliki kebutuhan kuat dengan capaian ingin untuk sukses, seharusnya tersebut memiliki kebutuhan yang tinggi untuk berprestasi. Kebutuhan yang tinggi untuk pencapaian menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi ketika orang itu menyelesaikan seperti proyek tepat waktu, menutup penjualan dengan prospek, atau mendorong ide-ide baru dan inovatif.

Model ini fokus pada bagian penduduk miskin dan menandakan bahwa masalah kemiskinan yang ada sekarang merupakan akibat dari marginalisasi masyarakat dari proses pembangunan. Model ini melakukan pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup kesempatan memperoleh penghasilan dan akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, penerangan dan lain-lain. Alasan utama timbul model pemenuhan kebutuhan dasar ini karena banyak masyarakat yang tidak memiliki aset produktif selain kekuatan fisik, keinginan kerja, dan inteligensi dasar mereka, selanjutnya tingkat kebutuhan dengan pendapatan yang tidak bisa menjangkau, dan peningkatan standar hidup golongan termiskin yang memerlukan waktu sangat lama, sehingga kerap kali belum dapat bekerja.²⁵

²⁴ Mahadiansar, dll. "*Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional di Indonesia*". Universitas Brawijaya. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol 17. No. 1 juni 2020. 86

²⁵ Adib Susilo, "*Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam*," *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016): 198-199

3) Model Pembangunan yang Berpusat pada Manusia

Model pembangunan yang sampai saat ini digalangkan adalah pembangunan yang berpusat pada manusia. David C. Korten menyebutkan model pembangunan tersebut sebagai model pembangunan yang berpusat pada manusia. Menurutnya mungkin semua kebutuhan dasar manusia bisa dipenuhi, tetapi itu bukan berarti telah memberikan mereka suatu lingkungan *forbeing human*. Korten selanjutnya menjelaskan bahwa tujuan pembangunan yang berpusat pada manusia adalah untuk membawa manfaat nyata bagi orang-orang, baik dalam tindakan maupun hasil mereka, dan memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan kecerdasan kreatif untuk masa depan mereka sendiri dan masyarakat. Model pembangunan ini mengurangi ketergantungan masyarakat pada birokrasi dan lebih menjamin tumbuhnya kemandirian masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan. Model pembangunan seperti itu memberi warga peran tidak hanya sebagai subjek, tetapi juga sebagai aktor yang menentukan tujuan mereka sendiri, mengontrol sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan mengarahkan proses yang memengaruhi kehidupan mereka.

Perubahan dalam masyarakat terjadi di semua bidang yaitu bidang ekonomi, politik, bahasa, kesenian, hiburan, adat dan lain sebagainya. Dalam beberapa abad tertentu, perubahan-perubahan ini terjadi dengan sangat lambat sehingga tidak terasa oleh manusia. Oleh karenanya, orang selalu berpendapat bahwa waktu tetap tenang dan semua berlangsung seperti biasa, seperti sekarang. Tetapi terdapat juga abad-abad di mana terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat dan mencolok pada semua bidang. Banyak orang yang menjadi tidak tenang dan menolak semua perubahan-perubahan. Esensi proses pembangunan pada model ini adalah peningkatan kualitas kepesertaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, persamaan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka diperlukan sinergitas pembangunan nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemahaman penerapan model ini

seringkali dipahami sebagai sebuah proses pemberdayaan. Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam lingkungan social dan aktualisasi potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

Dalam mengembangkan paradigma, fokus model ini adalah pada pemberdayaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan model pembangunan yang berorientasi pertumbuhan yang menitikberatkan pada industri, dan model pembangunan kebutuhan dasar/kesejahteraan yang menitikberatkan pada pelayanan publik. Peran negara dalam mendorong pembangunan dengan model pembangunan kebutuhan dasar adalah sebagai penyedia jasa dan pengusaha dalam model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Namun dalam model *community development*, negara berperan sebagai fasilitator. Oleh karena itu, sifat model ini mengedepankan keberdayaan dan kemandirian individu, masyarakat bukan sebagai subjek melainkan sebagai aktor yang berperan penting dalam proses pembangunan.²⁶

Meskipun pembangunan yang berpusat pada manusia, mengakui pentingnya pertumbuhan, namun penampilan dari suatu sistem pertumbuhan terutama tidak diukur berdasarkan nilai pertumbuhan yang dihasilkannya, melainkan lebih pada hubungannya dengan seberapa luas masyarakat terlibat didalamnya dan seberapa tinggi kualitas situasi kerja yang tersedia bagi mereka. Dalam hubungan itu, salah satu hal yang sangat penting yang membedakan model pembangunan yang berpusat pada manusia dengan model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan/produksi adalah bahwa yang pertama mensubordinasikan kepentingan sistem produksi dibawah kepentingan manusia, sementara yang kedua menempatkan kepentingan manusia dibawah subordinasi kepentingan sistem produksi.

Model ini menekankan bahwa pembangunan bukan sekedar meningkatkan kesadaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional serta terpenuhinya kebutuhan pokok saja. Tetapi yang lebih

²⁶ Mahadiansar, dll. "*Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional di Indonesia*". Universitas Brawijaya. Jurnal Ilmu Adminitrasi. Vol 17. No. 1 juni 2020. 87

penting lagi upaya meningkatkan partisipasi secara nyata dalam berbagai aktifitas kehidupan untuk mendorong terciptanya produktifitas yang bernilai tinggi.

Model pemberdayaan yang terakhir dirasa lebih tepat oleh banyak kalangan, sebab ia berorientasi pada manusia sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri. Peranan masyarakat sebagai fokus sentral dalam pembentukan kesadaran berpartisipasi terhadap pembangunan itu sendiri yang ternyata menjadikan masyarakat pasif dan reaktif menjadi peserta lebih aktif, yang dapat memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan sehingga harapannya dapat menyediakan lingkungan yang kondusif bagi aktualisasi potensi dan pertumbuhan masyarakat.

Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat telah banyak dilontarkan oleh pemerintah Indonesia. Mulai dari pemberian bantuan langsung sementara masyarakat, bantuan modal melalui program-program yang berbasis pemberdayaan masyarakat, pemberian modal kepada kelompok masyarakat yang sedang berkembang usahanya dalam sebuah kelompok usaha, pemberian dana untuk renovasi dan pemugaran rumah tidak layak huni.²⁷

f. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Islam

Pemberdayaan masyarakat menjadi usaha-usaha untuk mensejahterahkan masyarakat secara mandiri yang di dalamnya mengupayakan adanya bentuk kerjasama dan partisipasi warga. Tidak hanya itu pemberdayaan juga menerapkan nilai keadilan, persaudaraan, persamaan di tengah sistyem sosial dunia. Konsep pemberdayaan ini ternyata sudah berkembang sejak zaman Rasulullah SAW dalam berdakwah. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Rasulullah telah menjunjung dan menerapkan ajaran untuk saling menghargai, tolong menolong serta persamaan kesempatan dalam berusaha yang sangat relavan kaitannya dengan konsep pemberdayaan tersebut. Pengembangan atau pemberdayaan masyarakat Islam berarti mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan

²⁷ Adib Susilo, “*Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam,*” *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016): 198-199

keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. Amrulloh Ahmad menyatakan bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam.²⁸

Konsep pemberdayaan masyarakat sangat sejalan dengan ajaran Islam. Islam tidak hanya mengajarkan ketaatan kepada Allah, tetapi juga bahwa setiap orang peduli terhadap orang lain. Dengan kata lain, penguatan masyarakat merupakan wujud mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam ajaran Islam. Menjadi lebih kuat adalah gerakan berkelanjutan sebagai bagian dari perubahan. Dengan bantuan pemberdayaan, perubahan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dapat dilaksanakan. Prinsip perubahan dalam Islam dijelaskan dalam QS. Ar-Ra'd [13]: 11.

لَهُرْ مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ
 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا
 أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ

وَالِ

Artinya : “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Sayyid Qutb menegaskan bahwa ayat ini berbicara tentang perubahan yang harus dilakukan manusia. Baginya,

²⁸ Muhtadi Tatan Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam* (PMI), (Jakarta: Uin Jakarta Press, 2013): 11.

Allah tidak mengubah nikmat, musibah, kehormatan, kehinaan, status atau kehinaan kecuali mereka mau mengubah perasaan, tindakan dan realitas hidupnya. Oleh karena itu, ketika mereka berubah, Allah tidak mengubah keadaan orang menjadi lebih baik. dan tidak ingin mengubah apapun. Tentu saja, untuk berubah menjadi lebih baik membutuhkan dorongan dari orang lain. Inilah kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Di sinilah konsep pemberdayaan berperan. Dalam konsep ini, perubahan yang dialami oleh mereka yang tidak berdaya sangat bergantung pada bagaimana pemerintah dan mereka yang berkuasa mendorong dan mendorong mereka yang tidak berdaya untuk melakukan perubahan di bidang kehidupan menjadi lebih baik. untuk menjangkau siapa pun dengan keinginan dan pola pikir yang kuat untuk berubah. Keinginan dan cara berpikir ini dapat membangkitkan motivasi untuk perubahan positif dalam bentuk sikap, perilaku, dan kondisi kehidupan sosial.²⁹

Pengembangan atau pemberdayaan masyarakat Islam merupakan model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal saleh, dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Gerakan perubahan dalam masyarakat, yang diupayakan oleh masyarakat sendiri dan diarahkan pada tercapainya kondisi ideal bagi masyarakat yang bersangkutan, baik dalam sektor sosial, ekonomi, kesehatan, pemukiman. Mewujudkan pengembangan masyarakat yang baik perlunya peran serta masyarakat. Menurut Mulkhan konsep dan strategi dakwah harus diarahkan pada pemecahan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Dakwah pemecahan masalah diharapkan akan menghasilkan tiga kondisi, yakni tumbuhnya kepercayaan dan kemandirian umat serta masyarakat sehingga berkembang sikap optimis, tumbuhnya kepercayaan terhadap kegiatan dakwah guna mencapai tujuan kehidupan yang lebih ideal, berkembangnya suatu sosisio-ekonomi – budaya – politik - iptek sebagai landasan peningkatan kualitas hidup atau peningkatan kualitas sumber daya umat. Dakwah pemecahan masalah merupakan upaya yang demokratis bagi pengembangan dan peningkatan

²⁹ Achmad Saeful, Dan Sri Ramdhayanti, and Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam," *Achmad Saeful Dan Sri Ramdhayanti SYAR'IE* 3 (2020): 6-7 .

kualitas hidup sebagai bagian pemberdayaan manusia serta masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan objektif. Islam secara khusus sangat menekankan tentang pentingnya pemberdayaan atau pengembangan masyarakat. Islam memandang bahwa pengembangan masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat Islam yang di dalamnya, tidak boleh menghadirkan kemudharatan, melainkan harus membuat pemberdayaan yang berguna bagi hak warga negara. Karena itu jelas bawa semangat pemberdayaan merupakan tujuan utama untuk untuk menciptakan sistem hukum negara yang yang berkeadilan sosial.³⁰

Pemberdayaan masyarakat Islam menurut Mahfudz yang dikutip oleh Muhtadi menjelaskan bahwa, pemberdayaan masyarakat Islam adalah wujud dari bagian kegiatan berdakwah. Dakwah sendiri memiliki arti ajakan kepada manusia untuk berbuat kebaikan. Dalam hal ini dakwah tidak hanya upaya sebatas sebagai memberikan ceramah atau pidato kepada mad'u, melainkan juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia kearah yang lebih baik. Dakwah dalam bentuk kegiatan pemberdayaan disebut sebagai dakwah bil hal karena melalui tindakan secara langsung. Kegiatan berdakwah ini tidak semata hanya untuk mengubah keadaan mad'u dari bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat Islam merupakan suatu cara yang dilakukan untuk membina dan meningkatkan kualitas manusia yang beragama Islam dan terhubung dalam suatu ideologi yang sama.³¹

2. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Menurut M.J. Herskovits, masyarakat adalah sekelompok individu yang terorganisir yang mengikuti cara hidup tertentu. Jika J.L. Gill dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok orang terbesar yang memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan rasa persatuan yang sama. S.R.

³⁰ Abdul Halim, *Pidato Para Khalifah: Persoalan, Negara, Demokrasi, dan Penegakan Hukum*, (Surabaya: Nusantara Press, 2015), 44

³¹ Muhtadi, Tatan Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*, 9.

Steinmetz mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok terbesar dari orang-orang, termasuk kelompok-kelompok kecil dari orang-orang yang memiliki hubungan dekat dan teratur. Maclver berpendapat bahwa masyarakat adalah sistem adat dan prosedur, otoritas dan saling membantu, yang melibatkan kelompok dan divisi sosial lainnya, sistem kontrol perilaku dan kebebasan manusia, sistem atau jaringan hubungan sosial yang kompleks dan selalu berubah.³²

Masyarakat merupakan kumpulan individu dan kelompok yang membentuk organisasi sosial yang bersifat kompleks. Dalam organisasi sosial tersebut terdapat nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berfungsi sebagai aturan-aturan untuk bertingkah laku dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat.³³ Masyarakat memiliki hak, namun juga sebaliknya dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk diberdayakan, baik secara perorangan maupun kolektif bersama-sama dalam keikutsertaan pada pelaksanaan dan perencanaan program kesehatan.³⁴

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu *syarakah* yang berarti partisipasi atau penyertaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris *society is society* yang artinya meliputi interaksi sosial, perubahan sosial dan rasa memiliki. Dalam literatur lain, masyarakat disebut juga sebagai sistem sosial. Masyarakat juga berarti kesatuan hidup manusia, yang berinteraksi menurut suatu sistem adat tertentu yang berkesinambungan dan berkaitan dengan rasa identitas yang sama. Untuk pengertian masyarakat yang lebih luas, beberapa ahli menjelaskan, yaitu:

1) Karl Marx, Masyarakat adalah:

Suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis.

³² Beni Ahmad Saebani. *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 137.

³³ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: PT Setia Purna Inves) 2007, 24

³⁴ Alexander Lucas Riyadi, *Ilmu Kesehatan Masyarakat* (Yogyakarta: CV. Andi Affset) 2016, 258

- 2) Max waber, Masyarakat adalah:
 Suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.
- 3) Selo soemardjan, Masyarakat adalah:
 Orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Terbentuknya kelompok sosial atau masyarakat dikarenakan manusia-manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Manusia mempunyai naluri untuk selalu berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan dan terus menerus ini menghasilkan pola pergaulan yang disebut pola interaksi sosial.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, saling berinteraksi. masyarakat merupakan kesatuan-kesatuan hidup manusia, yang dalam bahasa Inggrisnya dipakai istilah *society*, yang berarti *kawan*. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab yang berarti *ikut serta*, berpartisipasi.³⁵

Menurut Peter L. Belger, definisi masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Pengertian keseluruhan kompleks dalam definisi tersebut berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan, misalnya dalam tubuh manusia terdapat bagian-bagian yang membentuk suatu sistem organik biologis, sprit jantung, hati, otak, dan paru-paru. Kesatuan dari bagian-bagian tersebut membentuk system yang namanya manusia. Demikian pula dengan masyarakat, di dalamnya terdiri atas bagian-bagian yang membentuk hubungan sosial. Misalnya hubungan orangtua dan anak, hubungan guru dan murid, hubungan atasan dan bawahan, yang keseluruhan hubungan yang luas itu disebut masyarakat.³⁶

b. Unsur-unsur Masyarakat

Kesatuan hidup manusia di lingkup desa, kota, maupun negara merupakan konsep masyarakat. Di setiap

³⁵ Nasrul Effendy, *Dasar-dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC) 1998, 4

³⁶ Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pratama) 2007, 18

kesatuan masyarakat, selalu ada unsur-unsur yang membentuk kesatuannya. Menurut Soerjono Soekanto, yang dikutip di dalam buku Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenai Antropologi, sejumlah unsur masyarakat adalah sebagaimana perincian di bawah ini:

- 1) Beranggotakan paling sedikit dua orang atau lebih.
- 2) Seluruh anggota sadar sebagai satu kesatuan.
- 3) Berhubungan dalam waktu yang cukup lama, menghasilkan individu baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antaranggota masyarakat.
- 4) Menjadi sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

Berbagai pola tingkah laku yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia yang kemudian disebut masyarakat. Pola-pola tersebut harus bersifat tetap dan berkelanjutan agar menjadi kebudayaan. Kebudayaan dilahirkan dari proses berpikir manusia, yang kemudian diyakini sebagai nilai-nilai hidup. Dengan demikian, masyarakat dan kebudayaan tidak akan mungkin terpisahkan karena masyarakat adalah wadah kebudayaan itu sendiri.

c. Ciri-ciri Masyarakat

Seperti yang dikemukakan oleh *kuntjaraningrat* adalah sebagai berikut:

- 1) Interaksi antar warga-warganya.
- 2) Adat istiadat, norma-norma, hukum-hukum, dan aturan-aturan khas yang mengatur seluruh pola tingkah laku warga kota atau desa.
- 3) Suatu komunitas dalam waktu.
- 4) Suatu rasa identitas dalam mengikat semua warga.

Banyak sekali definisi tentang masyarakat. Salah satunya Horton et al mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relative mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut.³⁷ Ada lagi Ralph Linton dalam Sitorus et. al yang mengartikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup

³⁷ Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia) 2015, 8

lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas. Sementara itu, Soejono Soekanto memerinci unsur-unsur masyarakat sebagai berikut:

- 1) Manusia yang hidup bersama.
- 2) Mereka bercampur untuk waktu yang lama.
- 3) Mereka sadar sebagai suatu kesatuan, dan.
- 4) Mereka merupakan suatu system yang hidup bersama.

Ciri-ciri masyarakat diatas, selaras dengan definisi masyarakat yang telah dikemukakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang sama. Di setiap zaman dan tempat, rakyat selalu bertujuan ingin mencapai kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang bebas dari berbagai tirani sosial.³⁸

3. Desa Wisata

a. Pengertian Desa Wisata

Menurut Nuryanti, desa wisata merupakan bentuk keterpaduan atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang dihadirkan dalam struktur kehidupan masyarakat yang terintegrasi dengan praktik dan tradisi yang berlaku. Sementara wisata desa (rural tourism), menurut Josh, adalah wisata yang terdiri dari total pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, dan elemen unik yang dapat menarik wisatawan secara keseluruhan.³⁹

Mengutip pendapat Subagyo, dari sudut pandang kehidupan masyarakat, desa wisata adalah bentuk pariwisata dengan objek dan daya tarik kehidupan desa khas masyarakatnya, dengan panorama alam dan budaya. Sehingga dapat dijadikan komoditas oleh wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Kehidupan desa sebagai tujuan wisata adalah desa sebagai objek dan sebagai objek wisata, yaitu desa. sendiri sebagai penyelenggara berbagai kegiatan wisata dan masyarakat dapat langsung menikmati hasilnya.

³⁸ Heri Kusmanto, *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 1, 2014, 86

³⁹ Made Antara dan I Nyoman Sukma Arida, *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Lokal* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2015), 7.

Oleh karena itu, peran aktif masyarakat sangat menentukan keberlangsungan aktivitas kota ini.

Sementara itu, definisi Pariwisata Inti Rakyat (PIR) dari Priasukmana dan Muyadini tentang desa wisata adalah kawasan pedesaan yang memberikan suasana keseluruhan yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari perspektif sosial ekonomi maupun sosial budaya. adat istiadat, kehidupan sehari-hari dengan arsitektur dan struktur bangunan Tata letak khas desa atau kegiatan ekonomi yang unik dan menarik serta berpotensi untuk mengembangkan berbagai komponen pariwisata seperti tempat wisata, akomodasi, makanan dan minuman, dll. Dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no. 26/2010 merupakan bentuk keterpaduan atraksi, akomodasi dan pelayanan penunjang yang dihadirkan dalam struktur kehidupan masyarakat desa wisata, yang terintegrasi dengan adat dan tradisi saat ini.⁴⁰

Desa wisata adalah kawasan atau kawasan pedesaan dengan daya tarik khusus yang dapat menjadi tujuan wisata. Penduduk desa wisata tetap menjaga tradisi dan budaya asli. Selain banyak kegiatan pendukung, seperti sistem pertanian, hortikultura dan makanan tradisional, mewarnai keberadaan desa wisata itu. Selain faktor tersebut, faktor lingkungan yang asli dan terjaga kelestariannya merupakan faktor penting yang harus ada dalam sebuah desa wisata.

Keberhasilan desa wisata atau village tourism sangat dipengaruhi oleh intensitas, lokasi, pengelolaan dan dukungan masyarakat setempat serta harus sesuai dengan keinginan masyarakat setempat dan tidak direncanakan secara sepihak. Dukungan diterima dari masyarakat setempat, tidak hanya dari individu atau kelompok tertentu.

b. Kriteria Desa Wisata

Suatu desa menjadi desa wisata apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Destinasi wisata, yaitu. segala sesuatu yang meliputi alam, budaya dan ciptaan manusia.
- 2) Jumlah kilometer, yaitu jarak dari kawasan wisata khususnya apartemen wisata, dan juga jarak dari ibu kota provinsi dan ibu kota daerah.

⁴⁰ stijabatul Aliyah, Dkk, *Desa Wisata Berwawasan Ekobudaya: Kawasan Wisata Industri Lurik*, Yayasan Kita Menulis, Surakarta, 2020. 11

- 3) Seluruh desa sesuai dengan jumlah penduduk, karakteristik dan luas desa. Kriteria ini terkait dengan kapasitas pariwisata desa.
- 4) Sistem kepercayaan dan masyarakat merupakan aspek penting, mengingat aturan khusus berlaku untuk masyarakat desa, agama mayoritas dan sistem sosial yang ada harus diperhitungkan.
- 5) Ketersediaan infrastruktur, termasuk sarana transportasi dan jasa, pembangkit listrik, jaringan telepon, dll.

c. Tipe Desa Wisata

Menurut pola, proses dan tipe pengelolaannya, desa atau kampung wisata di Indonesia terbagi dalam dua tipe yaitu tipe terstruktur dan tipe terbuka.

- 1) Tipe/wilayah terstruktur, tipe ini dicirikan oleh:
 - a) Negara pariwisata yang dilengkapi dengan infrastruktur khusus untuk wilayah tersebut. Tipe ini memiliki keunggulan dalam citra yang diciptakan untuk menembus pasar internasional.
 - b) Tempat tersebut biasanya terisolasi dari masyarakat atau penduduk setempat untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkannya. Selain itu, polusi sosial budaya yang disebabkan pada waktunya terdeteksi.
 - c) Lahan tidak terlalu besar dan masih dalam tingkat kemampuan perencanaan yang integratif dan terkoordinasi. Sehingga diharapkan akan tampil menjadi semacam agen untuk mendapatkan dana-dana internasional sebagai unsur utama untuk menangkap servis-servis dari hotel berbintang.
- 2) Tipe terbuka (spontan), tipe ini dicirikan oleh pertumbuhan wilayah dan integrasi ke dalam struktur kehidupan, baik dalam ruang maupun menurut pola dengan masyarakat setempat. Penduduk lokal dapat menikmati distribusi pendapatan pariwisata secara langsung. Namun, efek negatifnya adalah cepat menyebar ke penduduk setempat, sehingga tidak terkendali.⁴¹

⁴¹ Made Antara dan I Nyoman Sukma Arida, *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Lokal* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2015).10

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber lampau dari hasil penelitian yang nantinya diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan.⁴² Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh orang lain di masa lalu yang serupa dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui permasalahan, perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian lainnya. Mengetahui permasalahan dan perbedaan tersebut, dapat menunjukkan arah penelitian untuk menganalisis pola pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Banjarejo.

1. Penelitian yang ditulis oleh Sukri, HM. Nesor dan Fitri Yanti, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 13, No. 1, 2020. Dengan judul *Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Berbasis Desa Wisata Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues-Aceh*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan tentang upaya pemerintah Kecamatan Blangkejeren dalam pemberdayaan masyarakat islam berbasis desa wisata, proses pemberdayaanya dan perubahan setelah proses, guna meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Agusen. Penelitian ini menjelaskan tentang upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat yaitu: pertama melakukan pendekatan kepada masyarakat desa Agusen, kemudian merancang program yang semula desa tanaman kopi rami, pendirian desa wisata, pelatihan bahasa inggris dan pelatihan kewirausahaan. Kedua, menyadari potensi desa untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata, kemungkinan lahan subur dengan tanaman kopi sehingga tidak lagi membudidayakan ganja, kemudian pelatihan dan pengembangan keterampilan dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata, pelatihan kopi. petani dan kursus bahasa Inggris. Masyarakat mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik setelah pemberdayaan.⁴³ Adapun persamaan dengan penelitian yang

⁴² Aletheia Rabbani, *Pengertian Penelitian Terdahulu dan Manfaatnya*, diakses dari <https://www.sosial79.com/2020/11/pengertian-pengertian-terdahulu-dan.html?l=1>, pada tanggal 5 November 2022, Pukul 22:34

⁴³ Sukri, HM. Nesor, Fitri Yanti, *Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Berbasis Desa Wisata Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren*

dilakukan penulis adalah membahas tentang pemberdayaan masyarakat dengan menggali potensi desa menjadi desa wisata. Sebaliknya yang membedakan adalah tempat penelitian dan subjek penelitiannya.

2. Skripsi Kholidah Attina Yopa, NIM 12416244010, Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan judul Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Desa Wisata Budaya di Kebondalemkidul, Prambanan, Klaten, Jawa tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model pemberdayaan masyarakat ekonomi masyarakat melalui desa wisata budaya Kebondalemkidul, strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui desa wisata dan untuk mengetahui keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui desa wisata budaya Kebondalemkidul. Penelitian ini mendeskripsikan model pemberdayaan yang dilaksanakan di desa wisata budaya Kebondalemkulon dengan meningkatkan kesadaran ekonomi masyarakat dan menjaga sosialisasi untuk meningkatkan motivasi masyarakat, kemudian meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi desa wisata dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Pokdarwis dan lembaga masyarakat. kemudian memberdayakan masyarakat dalam bentuk keuangan atau permodalan, yang dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil masyarakat berdasarkan potensi masing-masing. Bisnis berjalan dengan baik dan produksi barang yang dijual meningkat karena turis dan tamu dari jauh datang.⁴⁴ Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas tentang model pemberdayaan masyarakat dan pembuatan desa wisata. Sebaliknya perbedaannya adalah objek dan subjek penelitian.
3. Skripsi oleh Tyas Arma Rindi NIM. 1502040116 Mahasiswa IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pemberdayaan masyarakat dan mengetahui

Kabupaten Gayo Lues-Aceh, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Islam, Vol. 13, No. 1, 2020, hal 63-70

⁴⁴ Kholidah Attina Yopa, *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Desa Wisata Budaya di Kebondalemkidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah*, SKRIPSI S-1, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 2017, 80

langkah-langkah pengembangan dari potensi pengembangan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini tentang potensi yang ada di Desa wisata dengan melihat potensi yang ada seperti kerajinan bambu, grass track dan embung tirtayasa. Hal ini dikarenakan pengembangan desa wisata banyak memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, masyarakat memiliki peran penting untuk menunjang keberhasilan pengembangan desa wisata sehingga masyarakat yang tidak berdaya perlu diberdayakan untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hasil dari penelitian ini banyak ditemukan kreasi unik dan ide menarik dengan adanya desa wisata menambah peluang penghasilan bagi masyarakat dan mengurangi kejahatan di wilayah tersebut dengan melatih anak muda membuat kreasi terbaru dan bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri.⁴⁵ Persamaan peneliti dengan penelitian yang akan ditulis adalah proses pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi desa. Perbedaannya dengan penelitian yang akan ditulis adalah objek yang berbeda dan proses pengembangan wisata yang berbeda.

4. Skripsi oleh Rimas Martiarini NIM. 1323203084 Mahasiswi IAIN Purwokerto tentang “strategi pengembangan desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat desa Ketenger Baturraden”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat desa Ketenger Baturraden dan strategi pengembangan desa melalui pemberdayaan masyarakat desa Ketenger Baturraden dalam perspektif islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Informasi mengenai penelitian didapatkan dari teknik-teknik pengumpulan data yang telah dilakukan terhadap subyek penelitian yaitu pengelola desa wisata ketenger dan tokoh masyarakat desa Ketenger. Hasil penelitiannya adalah strategi pengembangan desa melalui pemberdayaan masyarakat desa Ketenger. Ada 8 strategi yaitu pengkoordinasisaian antara pengelola desa wisata masyarakat, fasilitas pemerintah memberikan pendanaan untuk mengelola desa wisata, mengembangkan atraksi wisata, mempromosikan desa wisata,

⁴⁵ Tyas Arma Rindi, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur)*, (Skripsi: IAIN Metro, 2019), 6

penyediaan akomodasi, analisis program kelembagaan, pengelola souvenir, dan pengadaan fasilitas umum.⁴⁶ Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas tentang model pemberdayaan masyarakat dan pembuatan desa wisata. Sebaliknya perbedaannya adalah objek dan subjek penelitian.

Dari pemaparan penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Dari ke-empat penelitian di atas peneliti mendapat inspirasi untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat di desa wisata. Dan selanjutnya perbedaannya adalah objek yang berbeda dan proses pengembangan wisata yang berbeda.

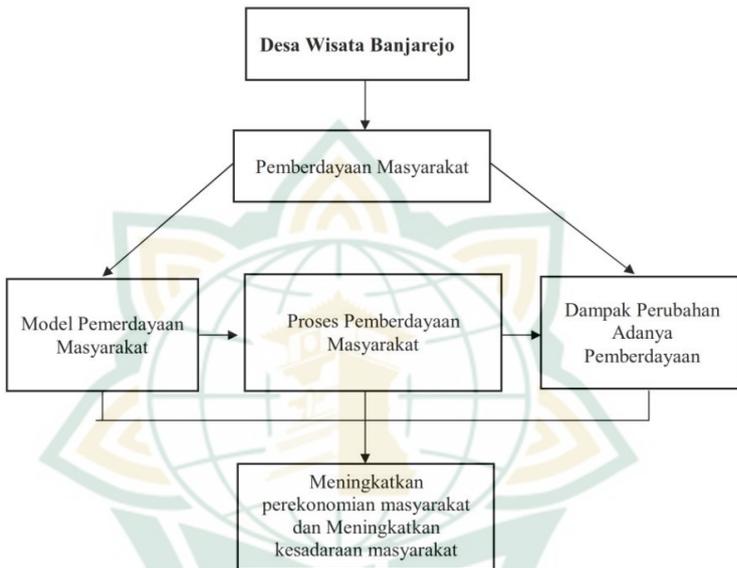
C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan konsep hubungan antara teori dengan faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berpikir menjelaskan secara teoritis bagaimana pertautan antar hal yang diteliti.⁴⁷ Kerangka berpikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui model pemberdayaan masyarakat di desa wisata Banjarejo. Model pemberdayaan masyarakat di desa wisata Banjarejo, menggunakan model pembangunan yang berpusat pada manusia, yang diimplementasikan berupa program penyadaran masyarakat. Selanjutnya, proses pemberdayaan masyarakat untuk proses pemberdayaan masyarakat pengelola desa wisata memberikan pelatihan-pelatihan dan dilibatkannya masyarakat dalam acara festival jerami. Setelah itu, dampak perubahan adanya pemberdayaan masyarakat di desa wisata Banjarejo diharapkan mampu lebih baik dari sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata diharapkan mampu memberikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sejarah dan meningkatkan perekonomian masyarakat serta dapat mengurangi kemiskinan dan kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera dan mandiri. Selain

⁴⁶ Rimas Martiarini, Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Ketenger, Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Purwokerto 2017.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 91.

keuntungan ekonomi masyarakat setempat juga dapat menjaga dan mempertahankan budaya lokal sekaligus melestarikan alam disekitar mereka. Dari pemaparan di atas, kerangka berpikir penelitian yang akan dilakukan penulis dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir